

ABSTRAK

Kekerasan psikis terhadap anak adalah salah satu jenis kekerasan yang bisa mengganggu pertumbuhan mental, sosial, dan emosional anak. Di Kota Bandung, masalah kekerasan terhadap anak masih terus terjadi dan memerlukan perhatian melalui kebijakan serta layanan perlindungan anak yang tepat. Salah satu cara menerapkan kebijakan itu adalah melalui layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan menguji bagaimana pemerintah kota Bandung menerapkan kebijakannya dalam mengatasi kekerasan psikis pada anak melalui layanan yang disediakan oleh UPTD PPA.

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumen, serta didukung oleh berbagai informasi dan dokumen resmi dari pemerintah. Analisis penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn tahun 1975, yang melibatkan enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya yang tersedia, karakteristik organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan, komunikasi di antara berbagai organisasi, sikap dan keinginan pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan sekitar.

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pemerintah kota Bandung dalam mengatasi kekerasan psikis pada anak melalui layanan UPTD PPA sudah berjalan cukup lancar. Pelayanan dilaksanakan dengan didukung oleh standar prosedur kerja, tenaga kerja, sarana yang tersedia, struktur organisasi, serta komunikasi dan kerja sama antar lembaga, serta komitmen para pelaksana untuk memberikan pelayanan yang baik kepada korban. Namun, penerapan masih mengalami beberapa hambatan, khususnya karena kurangnya tenaga profesional, kesulitan dalam mengkoordinasikan antarinstansi, serta faktor sosial dan ekonomi yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Oleh karena itu, penerapan kebijakan tersebut masih perlu ditingkatkan dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, memperkuat kerja sama antarinstansi, serta mengembangkan usaha pencegahan kekerasan psikis terhadap anak.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kekerasan Psikis pada Anak, Perlindungan terhadap Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Permayarakatan Anak, Kota Bandung.

ABSTRACT

Psychological abuse against children is a form of abuse that can disrupt a child's mental, social, and emotional development. In the city of Bandung, the problem of child abuse continues to occur and requires attention through appropriate child protection policies and services. One way to implement these policies is through the services provided by the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in the city of Bandung. This study aims to examine how the Bandung city government implements its policies to address psychological violence against children through the services provided by the UPTD PPA.

This study adopts a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through interviews and documents, and supported by various official information and documents from the government. The analysis of this study utilized Van Meter and Van Horn's 1975 policy implementation theory, which involves six variables: policy standards and objectives, available resources, characteristics of the organization responsible for implementing the policy, communication among various organizations, the attitudes and motivations of implementers, and the social, economic, and political conditions in the surrounding environment.

The study indicates that the implementation of the Bandung City government's policy to address psychological violence against children through the UPTD PPA services has proceeded fairly smoothly. Services are delivered with the support of standard operating procedures, staff, available facilities, organizational structure, as well as communication and cooperation among institutions, and the commitment of implementers to provide quality services to victims. However, implementation still faces several obstacles, particularly due to a shortage of professional staff, difficulties in coordinating across agencies, and social and economic factors beyond the organization's control. Therefore, the implementation of this policy still needs to be improved by enhancing human resource capabilities, strengthening interagency cooperation, and developing efforts to prevent psychological violence against children.

Keywords: Policy Implementation, Psychological Violence Against Children, Child Protection, Regional Technical Implementation Unit for Child Welfare, Bandung City.